

PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN DESTINASI EKOWISATA MANGROVE SIAK

Nurul Asyifa* & Suhirman

<http://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.1.04>

Diserahkan : 19 Juni 2023

Diterima: 26 Juni 2023

Diterbitkan: 30 Juni 2023

*Penulis korespondensi, e-mail:
28822008@mahasiswa.itb.ac.id

Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Provinsi Riau berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Program unggulan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Provinsi Riau adalah pengembangan kepariwisataan. Ekowisata mangrove atau bakau merupakan salah satu cara dalam mendukung status Kota Hijau yang sedang diterapkan di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memiliki 3 (tiga) destinasi ekowisata mangrove antara lain Ekowisata Mangrove Rawa Mekar Jaya, Ekowisata Mangrove Sungai Rawa, dan Ekowisata Mangrove Mengkapan. Artikel ini menjelaskan bahwa pengembangan kepariwisataan destinasi wisata merupakan bagian yang melekat dari pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak. Hal ini ditandai dengan peran-peran dari para stakeholder yang sangat berpengaruh bagi pengembangan pariwisata ini. Penelitian ini menganalisis aspek kepariwisataan yang berperan dalam pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *Social Network Analysis (SNA)*.

Kata Kunci: Ekowisata, Mangrove, Pariwisata, Peran, dan Siak.

Kepariwisataan bersifat multidimensi karena mencakup berbagai aspek seperti budaya, lingkungan alam, sejarah, kuliner, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menarik minat wisatawan. Kepariwisataan ini juga bersifat multidisiplin karena melibatkan berbagai bidang ilmu dan sektor industri, seperti pariwisata, ekonomi, manajemen, geografi, budaya, lingkungan, dan merupakan salah satu kebutuhan individu yang harus dipenuhi serta interaksi antara masyarakat setempat, wisatawan, pengusaha, serta Pemerintah. Kepariwisataan melibatkan berbagai kegiatan yang terkait dengan perjalanan, kunjungan, dan pengalaman wisata. Hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata tersebut seperti transportasi, akomodasi, atraksi wisata, aktivitas rekreasi, promosi pariwisata, pengembangan infrastruktur, pengelolaan destinasi, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan seperti wisatawan, masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, dan wirausaha. Kepariwisataan memiliki potensi untuk mendorong pemerataan ekonomi, memberikan peluang usaha, dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Dalam Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dijelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) dalam sektor pariwisata.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Sektor pariwisata Provinsi Riau saat ini berada pada fase pengembangan. Provinsi ini memiliki beberapa objek wisata alam maupun budaya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata di

Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau mencanangkan strategi dengan pendekatan yang umum diadopsi oleh banyak daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Strategi ini menekankan pengembangan industri kreatif dan citra pariwisata yang kompetitif untuk memperkuat posisi Provinsi Riau sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Strategi ini meliputi (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2019) :

1. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata
2. Peningkatan promosi pariwisata

Adapun beberapa program kerja yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan dalam pengelolaan tersebut sebagai berikut:

1. Program Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dengan pusat pemerintahan berada di Kota Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 Km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2020.

Gambar 1. Ekowisata Mangrove Siak

Program unggulan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Provinsi Riau adalah pengembangan kepariwisataan. Salah satu destinasi wisata yang dikembangkan di Kabupaten Siak adalah wisata alam terutama ekowisata hutan mangrove. Kepariwisataan memiliki peranan penting dalam revitalisasi budaya serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa, sehingga dalam pelaksanaan kepariwisataan, harus berlandaskan prinsip-prinsip manfaat, kekeluargaan, kerjasama, kesetaraan, keadilan, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi di setiap wilayah dan termasuk dalam program pembangunan nasional. Melalui kegiatan pariwisata, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan atau devisa negara, terutama melalui kunjungan wisatawan asing. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia secara umum, khususnya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pariwisata sebagai industri gaya baru mampu meningkatkan pertumbuhan SDM, penghasilan, kualitas kehidupan, dan dapat sekaligus menghidupkan sektor lain di dalam wilayah destinasi wisata. Sebagai salah satu sektor yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, pariwisata mampu membangkitkan sektor-sektor lainnya seperti industri penginapan, makanan dan minuman, transportasi, cinderamata, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Industri pariwisata adalah sektor jasa yang termasuk dalam industri

ketiga dan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan terkait peluang kerja (Spillane, 1993).

Kabupaten Siak telah mengembangkan salah satu destinasi ekowisata, yaitu wisata alam yang terutama difokuskan pada hutan mangrove. Hutan mangrove ini memiliki luas sekitar 6.820,53 hektar (Diskominfo Kabupaten Siak, 2017). Ekowisata mangrove atau bakau merupakan salah satu cara dalam mendukung status Kota Hijau yang sedang diterapkan di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memiliki 3 (tiga) destinasi ekowisata mangrove antara lain Ekowisata Mangrove Rawa Mekar Jaya, Ekowisata Mangrove Sungai Rawa, dan Ekowisata Mangrove Mengkapan. Melalui tiga destinasi ekowisata ini, dilakukan usaha untuk memperbanyak area hijau di Kabupaten Siak. Dengan adanya kawasan ekowisata mangrove ini, menjadi bukti nyata dari dedikasi Pemerintah Kabupaten Siak dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan visi Hijau. Selain berfungsi sebagai destinasi pariwisata, pengembangan ekowisata mangrove ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan hutan, mencegah praktik penebangan liar, serta memberikan warisan berharga bagi generasi mendatang.

Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekowisata yang berperan penting dalam menjaga kelestarian alam. Potensi ekowisata di hutan mangrove sangat besar karena keunikan kondisinya dan konsep daerah yang dapat

diprojekseikan menjadi tujuan pariwisata, dengan selalu mempertahankan keaslian lingkungan mangrove serta keberagaman makhluk hidup yang berekosistem di dalamnya. Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai pengembangan ekowisata merupakan pilihan yang sangat tepat dan logis di kawasan pesisir, karena ekowisata mangrove dapat memberikan manfaat finansial, berkontribusi dalam upaya pelestarian alam, serta mendorong upaya kegiatan konservasi ekosistem (Karlina, 2015). Dengan pelaksanaan pengembangan ekowisata mangrove ini, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan upaya inovatif untuk mengangkat Kabupaten Siak sebagai Kota Hijau yang terkenal dan tujuan wisata yang diakui baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan uraian pada sebelumnya yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini dirumuskan antara lain belum diketahuinya aktor serta perannya terhadap pengembangan Ekowisata Mangrove Siak dalam upaya konservasi mangrove. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Siapa saja *stakeholder* dan apa saja peran mereka terhadap pengembangan Ekowisata Mangrove Siak?
2. Apa rekomendasi terhadap kepranataan dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Siak?

Ekowisata

Ekowisata merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada keberlanjutan lingkungan, melibatkan pendidikan, serta interpretasi tentang alam, budaya, dan komunitas lokal. Ekowisata bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekologis, menghargai keragaman hayati, dan mempromosikan kehidupan berkelanjutan (Black, 1999). Ekowisata diperkenalkan pada awalnya oleh Hector Ceballos & Lascurain (1987) dimana mereka mengemukakan bahwa wisata alam atau pariwisata ekologi melibatkan perjalanan ke tempat-tempat alami yang masih terjaga dan minim gangguan manusia atau polusi, dengan maksud untuk belajar, menghargai, dan menikmati keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, serta aspek budaya dari masyarakat, baik yang terkait dengan masa lalu maupun masa kini. Ekowisata merupakan bentuk wisata alam yang berfokus pada upaya mengurangi dampak negatif, menjaga kelestarian spesies dan habitat alam, serta berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, sambil memberikan manfaat ekonomi yang tidak langsung kepada masyarakat setempat (Goodwin, 1997). Terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan Ekowisata antara lain (Eplerwood, 1999):

1. Mencegah dan menanggulangi dampak
2. Edukasi mengenai konservasi lingkungan
3. Memberikan manfaat ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh kawasan tersebut
4. Adanya partisipasi dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan

5. Pendapatan untuk masyarakat lokal
6. Memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan alam
7. Daya dukung atau kemampuan lingkungan untuk menopang kegiatan tertentu
8. Berpotensi menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara

Sedangkan menurut (Page & Dowling, 2002), terdapat 3 prinsip-prinsip utama ekowisata yakni sebagai berikut:

1. Prinsip Konservasi
Prinsip konservasi berarti memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan dedikasi untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya, serta melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan. Prinsip konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan yang mengikuti kaidah ekologi, sedangkan prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
2. Prinsip Partisipasi Masyarakat
Masyarakat lokal harus secara maksimal terlibat dalam tahapan perencanaan dan pengembangan ekowisata.
3. Prinsip Ekonomi
Pengembangan ekowisata bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, sehingga pemanfaatannya dapat berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan bagi generasi masa depan.

Kepranataan Destinasi Pariwisata

Pranata atau institusi merujuk pada peraturan yang berkaitan dengan aktivitas tertentu dalam masyarakat (Nurmansyah et al., 2019). Menurut Robert Melver dan C.H. Page pranata sosial adalah sebuah lembaga sosial yang berfungsi sebagai sistem atau aturan yang telah dibentuk untuk mengatur interaksi antara individu-individu yang menjadi bagian dari suatu komunitas (Soekanto, 1984). Sedangkan menurut Suhirman (2022), pranata merupakan jaringan hubungan dari komunitas lokal, kelompok fungsional, dunia usaha, dan pemerintah yang berkepentingan dengan pengembangan destinasi wisata. Kepranataan adalah proses mengenali dan menetapkan batasan serta tanggung jawab dalam penyelesaian masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, kepranataan juga mengidentifikasi keterkaitan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam tindakan kolektif (Stoker, 2018). Dalam sebuah kepranataan terdapat karakteristik antara lain (Santosa, 2009):

1. Pranata sosial diatur oleh norma-norma yang dianut dalam masyarakat dan diatur melalui adat istiadat, perilaku, kebiasaan, serta peraturan hukum.

Tabel 1. Aktor dan peran

Aktor	Peran
Dinas Pariwisata	Melakukan koordinasi untuk menjalankan tugas-tugas di Dinas Pariwisata sesuai dengan program-program yang telah ditentukan.
Pemerintah Daerah	Memberikan fasilitas, mendorong investasi, mengembangkan sektor pariwisata, mengelola aktivitas pariwisata, serta mengalokasikan dana untuk meningkatkan potensi pariwisata.
Kepala Desa	Mengeluarkan regulasi, mengawasi isu-isu terkait pertanahan, keamanan, dan ketertiban, melaksanakan tindakan perlindungan masyarakat, mengelola administrasi kependudukan, serta melakukan penataan dan pengelolaan wilayah.
Kelompok Masyarakat Pecinta Alam dan Peduli Lingkungan	Mengupayakan serta membina kelestarian lingkungan.
Pokdarwis	Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam perkembangan pariwisata, serta mendorong terwujudnya keindahan Sapta Pesona.
Masyarakat	Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan.
Wirausaha/UMKM	Menyediakan aneka kuliner, <i>home stay</i> , souvenir. Meningkatkan kualitas SDM.
NGO	Bekerja sama dalam upaya pengembangan pariwisata.
Lingkar Temu Kabupaten Lestari	Kerja sama antar kabupaten untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Wisatawan	Berkontribusi dalam segi ekonomi, budaya, hingga keberlangsungan pariwisata.

Sumber: Hasil analisis, 2023.

2. Proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama dan memiliki sifat yang permanen.
3. Mengarah pada pencapaian suatu tujuan.
4. Mempunyai alat yang digunakan untuk memenuhi suatu tujuan.
5. Mempunyai lambang atau simbol.
6. Mempunyai peraturan dan tradisi.

Aspek kepranataan dalam pariwisata membantu perencana dalam mendefinisikan ruang lingkup dan arena perencanaan, aktor yang berkepentingan dan akan dilibatkan, model komunikasi dan metode perencanaan, serta model pengambilan keputusan dalam perencanaan (Suhirman, 2022). Perencanaan sebagai proses pembentukan keputusan & tindakan kolektif telah mendorong rencana untuk fokus pada proses-proses kepranataan (*institutional design*) atau desain kelembagaan dalam perencanaan, baik kepranataan formal maupun informal (Alexander, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan menjadi issue penting dalam perencanaan karena perencanaan membutuhkan aktor-aktor baik berupa individu maupun kelompok yang diakomodir dalam suatu wadah yakni organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

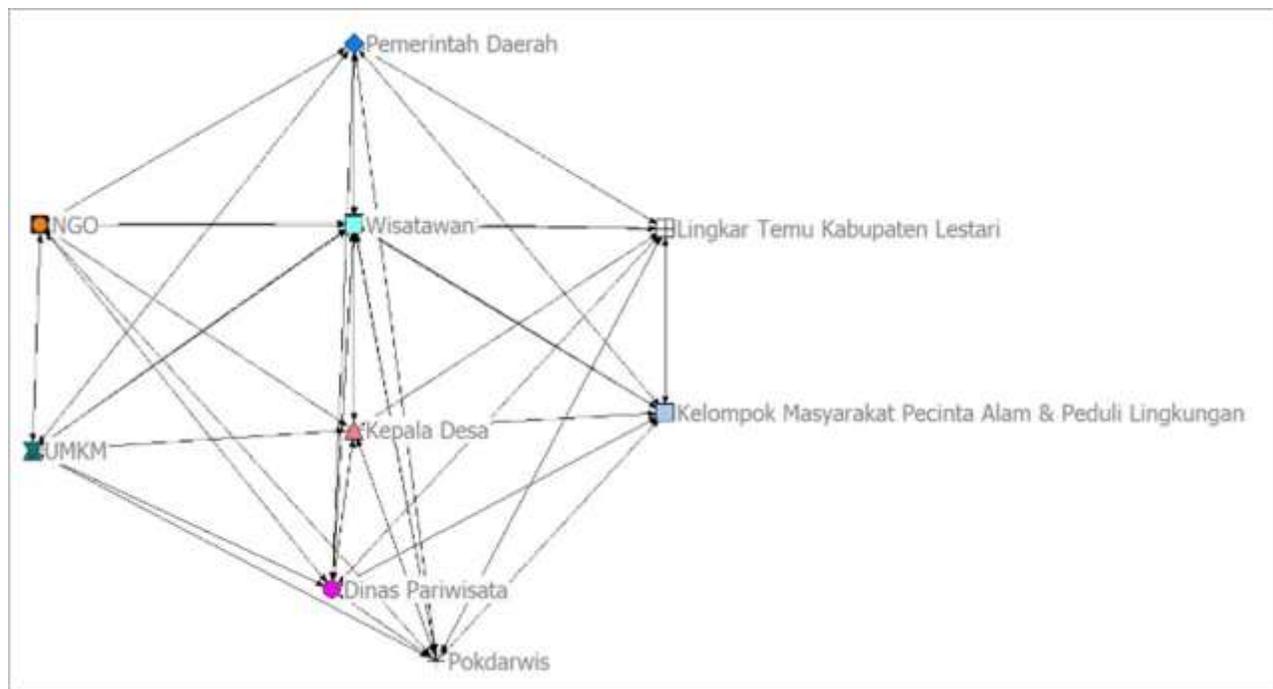
Pendekatan Pentahelix telah menjadi model kepranataan untuk pengembangan destinasi pariwisata di berbagai negara. Pentahelix adalah suatu konsep inovasi yang diterapkan dengan tujuan meningkatkan tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, konsep ini melibatkan lima pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, sektor bisnis (swasta), media, lembaga akademik, dan komunitas. Setiap unsur ini memiliki peran dan pengaruh yang penting, dan ketika

mereka bekerja sama dalam kolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu maka hasil yang optimal dapat tercapai.

Analisis Kepranataan Destinasi Pariwisata

Artikel ini menjelaskan bahwa pengembangan kepranataan destinasi wisata merupakan salah satu komponen yang melekat dengan pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak. Hal ini ditandai dengan peran-peran dari para stakeholder yang sangat berpengaruh bagi pengembangan pariwisata ini. Pencetus ide dari pengembangan Ekowisata Mangrove Siak ini awalnya berasal dari masyarakat lokal yang tergabung dalam komunitas atau kelompok masyarakat pecinta alam & peduli lingkungan. Pada awalnya kawasan tersebut merupakan tempat untuk melangsirkan bibit mangrove. Lalu komunitas tersebut membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan terbitnya SK dari Kepala Desa Rawa Mekar Jaya dan menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi atau daerah tujuan pariwisata di Kabupaten Siak, serta menjadi salah satu ikon Kota Hijau (Hartono et al., 2022). Dengan begitu diharapkan pengembangan destinasi ekowisata mangrove ini dapat berjalan secara sistematis dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Pengembangan Ekowisata Mangrove Siak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, terdapat juga kerjasama dari berbagai pihak seperti beberapa wirausaha yang ada di desa & masyarakat yayasan lintas pesisir. Hubungan yang terjalin antara para stakeholder ini merupakan langkah awal dari implementasi ide masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata ini. Terdapat kerjasama baik dalam memberikan pendapat maupun berupa bantuan secara materi demi upaya



Sumber: Hasil analisis, 2023.

Gambar 2. Hasil Visualisasi Jaringan

pengembangan aksesibilitas menuju ke lokasi pariwisata. Masyarakat serta pokdarwis juga mencari bantuan kerjasama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, pihak swasta, serta NGO (*Non Government Organization*). Selain itu, Kabupaten Siak juga tergabung dalam sebuah forum yakni Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang merupakan sebuah forum kolaborasi kabupaten yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah melakukan usaha dengan cara memfasilitasi komunitas yang mengelola ekowisata mangrove ini yakni Pokdarwis. Terdapat beberapa kegiatan seperti diklat atau pelatihan yang dilakukan oleh Pokdarwis yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Kegiatan ini meliputi segi pengelolaan, pengembangan serta pemeliharaan agar wawasan tentang pengembangan ekowisata dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Siak juga menyerahkan penghargaan atau *reward* bagi anggota Pokdarwis yang aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut untuk memotivasi para anggota. Selain itu Pemerintah Kabupaten Siak juga bekerja sama dengan Pokdarwis dalam bidang promosi atau *branding* bersama dengan destinasi wisata lain yang ada di Kabupaten Siak (Hartono et al., 2022).

Dinas Pariwisata adalah salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kinerja mereka didasarkan pada peraturan dan sesuai dengan visi dan misi serta prinsip dari Bupati Kabupaten Siak. Visi tersebut adalah menciptakan Siak sebagai destinasi wisata di Sumatera dengan mempromosikan kearifan lokal sebagai identitasnya. Namun, hal ini tidak dapat terwujud tanpa kerjasama dari

berbagai pihak. Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan beberapa aktor, termasuk Dinas Pariwisata di kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan Lembaga Adat Melayu (LAM). Namun, dalam praktiknya, peran Lembaga Adat Melayu (LAM) hanya sebatas sebagai tamu terhormat dan tidak dilibatkan dalam tahapan serta langkah-langkah perumusan program kegiatan pariwisata. Kabid Pemasaran Pariwisata Siak mengakui bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikut sertakan Lembaga Adat Melayu dalam tahapan pengelolaan pariwisata (Wazni & MS, 2021).

Pengembangan Ekowisata Mangrove Siak ini sangat bergantung oleh para *stakeholder* yang memiliki peran masing-masing. Aktor-aktor yang berperan dalam pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove di Kabupaten Siak antara lain:

1. Dinas Pariwisata
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
3. Kepala Desa
4. Kelompok masyarakat pecinta alam & peduli lingkungan
5. Pokdarwis
6. Masyarakat
7. Wirausaha / UMKM
8. NGO
9. Lingkar Temu Kabupaten Lestari (forum kolaborasi kabupaten)
10. Wisatawan

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan beberapa aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata

		1 OutDegree	2 InDegree	3 NrmOutDeg	4 NrmInDeg
1	Dinas Pariwisata	9.000	9.000	100.000	100.000
2	Pemerintah Daerah	9.000	9.000	100.000	100.000
3	Kepala Desa	9.000	9.000	100.000	100.000
6	Masyarakat	9.000	9.000	100.000	100.000
5	Pokdarwis	9.000	9.000	100.000	100.000
10	Wisatawan	9.000	9.000	100.000	100.000
7	UMKM	7.000	7.000	77.778	77.778
4	Kelompok Masyarakat Pecinta Alam & Peduli Lingkungan	7.000	7.000	77.778	77.778
9	Lingkar Temu Kabupaten Lestari	7.000	7.000	77.778	77.778
8	NGO	7.000	7.000	77.778	77.778

(a)

		1 Farness	2 nCloseness
1	Dinas Pariwisata	9.000	100.000
2	Pemerintah Daerah	9.000	100.000
3	Kepala Desa	9.000	100.000
6	Masyarakat	9.000	100.000
5	Pokdarwis	9.000	100.000
10	Wisatawan	9.000	100.000
7	UMKM	11.000	81.818
4	Kelompok Masyarakat Pecinta Alam & Peduli Lingkungan	11.000	81.818
9	Lingkar Temu Kabupaten Lestari	11.000	81.818
8	NGO	11.000	81.818

(b)

		1 Betweenness	2 nBetweenness
1	Dinas Pariwisata	0.667	1.852
2	Pemerintah Daerah	0.667	1.852
3	Kepala Desa	0.667	1.852
6	Masyarakat	0.667	1.852
5	Pokdarwis	0.667	1.852
10	Wisatawan	0.667	1.852
7	UMKM	0.000	0.000
4	Kelompok Masyarakat Pecinta Alam & Peduli Lingkungan	0.000	0.000
9	Lingkar Temu Kabupaten Lestari	0.000	0.000
8	NGO	0.000	0.000

(c)

Sumber: Hasil analisis, 2023.

Gambar 3. (a) Degree Centrality; (b) Closeness Centrality; (c) Betweenness Centrality

Mangrove Siak serta peran terhadap pengembangan pariwisata tersebut.

Dari tabel analisa *stakeholder* yang sudah dijelaskan di atas yang menampilkan beberapa aktor-aktor serta perannya masing-masing, terdapat peran secara umum dari Pemerintah, swasta, komunitas, serta masyarakat. Dari tabel tersebut dapat dihasilkan analisa selanjutnya dengan

menggunakan metode SNA (*Social Network Analysis*) dengan menampilkan pola-pola jejaring antar aktor-aktor melalui *software* Ucinet dan Netdraw sehingga didapatkan hasil visualisasi jaringan sosial yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.

Dari hasil perhitungan *Degree Centrality* analisa SNA melalui *software* Ucinet dapat diketahui bahwa aktor yang memiliki

koneksi dan peran terbanyak dalam pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak antara lain Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, serta Pokdarwis. Hal ini diuraikan dalam Gambar 3 dimana nilai tertinggi dari perhitungan *Degree Centrality* dimiliki oleh aktor-aktor tersebut.

Selanjutnya dilakukan perhitungan *closeness centrality* yang diuraikan dalam Gambar 4 untuk mengukur kemudahan stakeholder dalam berinteraksi dan menyebarkan informasi dengan baik (kedekatan hubungan antar aktor). *Closeness centrality* ini dapat mengetahui informasi yang tersebar dalam jaringan dan aktor yang paling efektif untuk menyebarkan informasi (*broadcaster*). Dari hasil analisa *closeness centrality* ini dapat diketahui bahwa aktor atau stakeholder yang mempunyai hubungan yang paling dekat antara lain Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, masyarakat, Pokdarwis, dan wisatawan. Aktor-aktor tersebut memiliki banyak peran yang serupa dalam jaringan sosial atas upaya pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak.

Selain itu terdapat perhitungan *betweenness centrality* yang digunakan untuk menentukan aktor yang mengendalikan atau yang menjadi fasilitator untuk menyebarkan informasi dalam suatu jaringan. Dari hasil perhitungan *betweenness centrality* dapat disimpulkan aktor yang berperan sebagai perantara antara lain Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, masyarakat, Pokdarwis, dimana aktor-aktor tersebut memiliki interaksi tertinggi dengan aktor lainnya dalam suatu jaringan. *Betweenness centrality* ini diuraikan dalam Gambar 5 sebagai berikut.

Argumentasi & Rekomendasi

Pihak Dinas Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan promosi serta dapat lebih baik lagi dalam mengatur biaya promosi, baik itu bekerja sama dengan agen *tour and travel*, promosi melalui *social media*, dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan kepada Dinas Pariwisata dapat bekerja sama juga dengan para *stakeholder* untuk lebih meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata, baik dengan kerja sama ke pemerintah daerah untuk mengajukan tambahan anggaran maupun kerjasama dengan stakeholder lain seperti pihak swasta, serta NGO (*Non Government Organization*). Hal ini bertujuan agar destinasi wisata dapat dengan mudah dikunjungi oleh para wisatawan. Selain itu dalam merumuskan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah diharapkan untuk tetap melakukan musyawarah dengan masyarakat lokal, Kepala Desa, dan Pokdarwis guna menciptakan iklim yang kondusif dan mengurangi konflik yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat lokal, serta mencegah dampak terhadap lingkungan dalam usaha pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak tersebut.

Kesimpulan

Kepranataan destinasi wisata merupakan bagian yang melekat dari pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak. Pengembangan serta keberlangsungan Ekowisata

Mangrove Siak ini sangat bergantung oleh para *stakeholder* yang memiliki peran masing-masing. Adanya kolaborasi antara masyarakat, komunitas, swasta, hingga pemerintah sangat berpengaruh dalam pengembangan destinasi ini. Para *stakeholder* dapat meningkatkan kinerja serta menambah relasi kerjasama dalam memajukan destinasi Ekowisata Mangrove Siak, mendukung status Kota Hijau yang sedang diterapkan di Kabupaten Siak, serta dapat selalu menerapkan prinsip ekowisata yakni mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan, edukasi mengenai konservasi lingkungan, memberikan manfaat ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh kawasan tersebut, adanya partisipasi dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan, memberikan pendapatan untuk masyarakat lokal, memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan alam, daya dukung atau kemampuan lingkungan untuk menopang kegiatan tertentu, serta berpotensi menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara.

Daftar Pustaka

- Alexander, E. R. (2005). Institutional transformation and planning: From institutionalization theory to institutional design. *Planning Theory*, 4(3), 209–223. DOI: 10.1177/1473095205058494
- Black, R. (1999). *Ecotourism and Education*.
- Ceballos, H., & Lascurain. (1987). *Ecotourism*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Riau. (2019). *Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024*.
- Diskominfo Kabupaten Siak. (2017). *Pesona Siak*. <https://pesonasiak.id/>
- Eplerwood. (1999). *The Ecotourism Society*.
- Goodwin, H. (1997). *The British Ecotourism Market*.
- Hartono, T., Trisakti, F. A., & Fuadiah, I. (2022). Community-based ecotourism: peran 'Pokdarwis' dalam branding Siak Hijau. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.26018>
- Karlina, E. (2015). Strategi pengembangan ekowisata mangrove di kawasan pantai tanjung bara, kutai timur, kalimantan timur (. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 12(1), 191–208.
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog. In *CV Aura Utama Raharja*.
- Page, S., & Dowling, R. K. (2002). *Ecotourism*. Licensing Agency.
- Pemerintah Pusat. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan*

Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025.

Santosa, A. (2009). Pranata Sosial : Pengertian, Tipe dan Fungsi. *Jurnal: Pendidikan Sosiologi*, 1, 1–23.

Soekanto, S. (1984). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Rajawali Pers.

Spillane, J. J. (1993). *Ekonomi pariwisata : sejarah dan prospeknya*.

Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 68(227–228), 15–24. DOI: 10.1111/issj.12189

Suhirman. (2022). *Kepranataan dalam Kepariwisataan*.

Wazni, & MS, Z. H. (2021). Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak. *Jurnal PolGov*, 3(2), 95–126.



Nurul Asyifa, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Arsitektur di Universitas Riau pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung.



Suhirman, merupakan dosen pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Padjajaran pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000, dan menempuh pendidikan S3 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011.